

PEMERINTAH KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA  
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH



RENCANA KERJA  
2025



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia – Nya kepada kita sekalian, shalawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam, Beserta Kerabat, Sahabat serta kita sekalian pengikut sampai akhir zaman. Ranwal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Koperasidan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini merupakan dokumen turunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah periode 2021-2026. pada Tahun 2025 menjadi tahun keempat dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah atau Rencana Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara (RPJMD) Tahun 2021-2026

Selanjutnya pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini.

Demikian dan dengan Izin dan Kehendak-Nya semoga dokumen ini dapat memberikan arah yang sinergis, terkoordinasi dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat mewujudkan tujuan organisasi sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan.

Tenggarong, Agustus 2024

Plt.Kepala Dinas

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Kabupaten Kutai Kartanegara



**H. Thaufiq Zulfian Noor, S.Pi., M.A.P**  
**NIP.197401222001121002**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD	6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD	13
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN UKM	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	32
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-PD	33
BAB IV. RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	36
BAB V. PENUTUP	48
LAMPIRAN CAPAIAN PROGRAM DEDIKASI BUPATI KUTAI KARTANEGARA	

## DAFTAR TABEL

Hal :

2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2024 (TC. 29)	07
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM (TC.30)	15
2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 (TC. 31)	18
2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 (TC. 32)	30
3.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026	35
4.1	Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas (TC. 33)	38

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Rencana Kerja Tahunan yang paralel dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan yang penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan kegiatan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk mencapai keterpaduan Rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mengacu pada Undang - Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dan Pasal 3 ayat (2) bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Disebutkan juga dalam Pasal 3 ayat (3) Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu dalam mengimplementasikan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut maka setiap tahun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD atau sekarang dikenal dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Renja SKPD/OPD, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD/OPD.

Renja OPD merupakan Dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan

masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap OPD untuk memiliki Rencana Kerja (Renja – OPD) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 260 ayat (1) bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam Pasal 263 bahwa Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);  
merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);  
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
  - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).  
merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

4. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 05.05.889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah mempunyai amat bertanggung jawab

dalam menyusun program, yang berpedoman pada kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan, keuangan daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 6 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kutai Kartanegara tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 58 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil;
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 3 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi;
18. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penetapan RKPD 2025

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tahun 2025, dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara.

#### **2. Tujuan**

Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2025.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Renja-PD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang perlunya Renja-PD, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renja-PD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renja-PD.

##### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU**

Dalam bab ini memuat struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73)

##### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dalam Bab ini dipaparkan rumusan Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan penjabaran dari visi dengan lebih spesifik dan terukur yang dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai dengan uraian program dan kegiatan yang merupan panjabaran dari strategi dan kebijakan yang diambil dalam mewujudkan tujuan.

##### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam Bab ini dipaparkan / dikemukakan rencana kerja pendanaan program dan kegiatan, indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara;

##### **BAB V. PENUTUP**

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja tahun ke III yang merupakan tunan dari rencana strategis yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2021-2026;

Terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong diantaranya keterhambatan beberapa kerbatasan cara berinovasi dari sumber daya mananusia yang ada, maping data yang belum maksimal, dan belum terdapat penyusunan roadmap yang pasti untuk menajankan program kegiatan yang ada. yang menjadi pendorong adalah terlaksana seluruh program kegiatan sehingga tercapai pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan / program / kegiatan.

Maka dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 diperlukan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

**Tabel (T.C 29)**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2025**  
**Kabupaten Kutai Kartanegara**

Nama OPD : Dinas Koperasi dan UKM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2.17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH													
2.17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,00	71,79	70,00	85,40	122%	70	73	91,25%			
	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	8	4	4	100%	4	16	80,00%	
	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5	2	1	1	100%	1	4	80,00%
	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	15	6	3	3	100%	3	12	80,00%
	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	10	4	2	2	100%	2	8	80,00%

	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60	24	12	12	100%	12	48	80,00%
	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	5	2	1	1	100%	1	4	80,00%
	01	2	03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>80,00%</b>
	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD	5	2	1	1	100%	1	4	80,00%
	01	2	05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>80,00%</b>
	01	2	05		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya bagi Pegawai	318	0	142	142	0%	0	142	44,65%
	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150	30	30	30	100%	30	90	60,00%
	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi	60	30	0	0	0%	0	30	50,00%
	01	2	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>34,28%</b>	54,63%	<b>100,00%</b>	54,63%	75,00%	75,00%	75,00%
	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Penerangan Kantor	48	12	12	12	100%	12	36	75,00%
	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK	225	90	45	45	100%	45	180	80,00%
	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95	38	19	19	100%	19	76	80,00%
						Jumlah Porsi Makan dan Minum	4000	1300	800	800	100%	800	2900	72,50%
	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41	14	7	7	100%	9	30	73,17%
	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1160	446	250	250	100%	250	946	81,55%
	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Sarana dan prasarana Arsip pada SKPD	27	17	5	5	100%	5	27	100,00%

	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	8	4	2	2	100%	2	8	100,00%
	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	2	1	1	100%	1	4	80,00%
	01	2	07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>35,85%</b>	<b>55,97%</b>	<b>100,00%</b>	55,97%	<b>74,84%</b>	<b>74,84%</b>	<b>74,84%</b>
	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	159	57	32	32	100%	30	119	74,84%
	01	2	08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>24,16%</b>	<b>46,14%</b>	<b>100,00%</b>	46,14%	68,12%	68,12%	68,12%
	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	981	218	218	218	100%	218	654	66,67%
	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Pembayaran rekening	60	24	12	12	100%	12	48	80,00%
	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	24	12	12	100%	12	48	80,00%
	01	2	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>40,19%</b>	<b>60,36%</b>	<b>100,00%</b>	60,36%	80,35%	80,35%	80,35%
	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	125	50	25	25	100%	25	100	80,00%
	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140	50	30	30	100%	30	110	78,57%
	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5512	2222	1110	1110	100%	1100	4432	80,41%
<b>2.17</b>	<b>02</b>				<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>Persentase Koperasi yang memiliki ijin usaha simpan pinjam</b>	<b>75,6%</b>	<b>45,90%</b>	<b>53,30%</b>	<b>0,00%</b>	0%	60,70%	60,70%	80,34%
<b>2.17</b>	<b>02</b>	2	01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Simpan Koperasi	100%	<b>20,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>0,00%</b>	20,00%	<b>40,00%</b>	<b>40,00%</b>	40,00%

2.17	02	2	01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang di Fasilitasi	50	10	10	0	0%	10	10	20,00%
2.17	03				<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Kepatuhan Koperasi Melaksanakan RAT</b>	<b>27,24%</b>	15,56%	19,46%	20,98%	107,81%	21,40%	21,40%	78,57%
2.17	03	2	01		<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi</b>	<b>83,87%</b>	<b>43,93%</b>	<b>67,89%</b>	<b>67,89%</b>	100,00%	<b>75,88%</b>	75,88%	90,47%
2.17	03	2	01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Koperasi	200	125	150	150	100%	175	175	87,50%
						Jumlah Koperasi yang didampingi RAT	30	10	15	15	100%	20	20	66,67%
2.17	03	2	01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Koperasi	325	150	275	275	100%	300	300	92,31%
						Jumlah Fasilitasi Pembubaran Koperasi	25	0	5	5	100%	15	15	60,00%
2.17	04				<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi KSP/USP berkategori Sehat dan Cukup Sehat</b>	<b>18,52%</b>	3,70%	7,41%	7,41%	100,00%	11,11%	11,11%	59,99%
2.17	04	2	01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP	180	53	150	150	100%	160	160	88,89%
2.17	04	2	01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan sertifikat penilaian	90	53	75	75	100%	80	80	88,89%

2.17	04	2	01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan koperasi	90	0	75	75	100%	80	80	88,89%
2.17	05				<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Persentase Pengurus dan Pengawas yang memiliki sertifikat pelatihan Perkoperasian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
2.17	05	2	01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	405	90	90	90	100%	90	210	51,85%
2.17	05	2	01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peserta yang dilatih	810	252	180	180	100%	254	686	84,69%
2.17	06				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	Persentase meningkatnya Aset Koperasi	4,86%	0,97%	1,95%	4,66%	239%	2,92%	2,92%	60,04%
						Persentase meningkatnya Volume Usaha (Omset) Koperasi	4,86%	0,97%	1,95%	3,14%	161%	2,92%	2,92%	60,04%
2.17	06	2	01		<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	60	25	40	40	100%	50	50	83,33%
2.17	06	2	01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang di Fasilitasi	60	25	40	40	100%	50	50	83,33%
2.17	07				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Persentase UMKM yang telah difasilitasi	9,77%	1,18%	1,99%	2,38%	120%	1,99%	5,55%	56,81%
2.17	07	2	01		<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	Jumlah UMKM yang di berdayakan	5504	1140	1121	1121	100,00%	1121	3382	61,45%

2.17	07	2	01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi Usaha Mikro	3	1	1	1	100%	1	3	100,00%
2.17	07	2	01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Pendampingan Pelaku Usaha	80	0	20	20	100%	20	40	50,00%
2.17	07	2	01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah umkm yang difasilitasi kemudahan perizinan usaha	700	140	240	240	100%	140	520	74,29%
2.17	07	2	01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Peserta Pelatihan	2400	660	480	480	100%	480	1620	67,50%
						Pelatihan Wirausaha baru	1200	180	240	240	100%	240	660	55,00%
2.17	07	2	01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengakses Permodalan	640	160	160	160	100%	120	440	68,75%
						Pendampingan Pembentukan dan Fasilitasi Sarana Prasarana Klinik Klinik K-UMKM	13	1	3	3	100%	3	7	53,85%
2.17	08				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Pertumbuhan Omset UMKM</b>	<b>1,4%</b>	<b>0,70%</b>	<b>0,60%</b>	<b>1,35%</b>	<b>225%</b>	<b>1,10%</b>	<b>1,10%</b>	<b>77,47%</b>
2.17	08	2	01		<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Jumlah Pengembangan Usaha Mikro</b>	<b>1700</b>	<b>363</b>	<b>718</b>	<b>718</b>	<b>100%</b>	<b>320</b>	<b>1038</b>	<b>61,06%</b>
2.17	08	2	01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Pelaku Usaha Yang difasilitasi akses Pemasaran	600	143	120	120	100%	120	240	40,00%
						Jumlah Pelaku Usaha yang dilatih Kemasan, dan bantuan sarana prasarana	1100	220	598	598	100%	200	798	72,55%
						Jumlah Event yang diikuti	17	1	10	10	100%	10	20	117,65%

## 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dengan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sasaran Strategis Dinas Koperasi dan UKM sebagai berikut :

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Koperasi dan UKM;
2. Meningkatnya UMKM Wirausaha Baru;
3. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi;
4. Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro

Pada tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah melaksanakan 8 Program dengan capaian kinerja Organisasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 8 Kegiatan 21 Sub Kegiatan yang berisikan kegiatan rutin Perkantoran pada setia Perangkat Daerah, dengan rata-rata capaiannya Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar **85,40 %**

2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam ada 1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan yang berisikan kegiatan fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota, capaiannya rata-rata **0%** Dikarenakan Adanya Regulasi Perizinan Simpan Pinjam Sebagaimana Surat Edaran No. 11 Tahun 2022 Tentang Moratorium Perizinan Simpan Pinjam Koperasi Tanggal 17 November 2022

3. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi ada 1 Kegiatan, 2 sub kegiatan, yang berisikan kegiatan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota dan pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten / kota dengan capainnya **100%**

4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;

Program Peneilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi ada 1 Kegiatan, 2 sub kegiatan yang berisikan pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota dan penghargaan kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota dengan rata-rata capaiannya **100%**

5. Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian

Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian ada 1 Kegiatan, 1 sub kegiatan yang berisikan kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota untuk peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi dengan rata-rata pencapaiannya Program **100%**

6. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi ada 1 Kegiatan, 1 sub kegiatan dengan kegiatan yang dilaksanakan pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, sandarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten/kota, dengan rata-rata pencapaiannya **100%**

7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm)

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm) ada 1 Kegiatan dan 5 sub Kegiatan, Adapun Kegiatannya pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro, dengan rata-rata pencapaiannya **100%**

8. Program Pengembangan UMKM

Program Pengembangan Pengembangan UMKM dengan 1 kegiatan, 1 sub kegiatan yang kegiatannya fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Design dan Teknologi, dengan tingkat capaiannya **100 %**

Capaian kinerja pelayanan OPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan indikator kinerja, untuk uraian terhadap pencapaian kinerja pelayanan OPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara detailnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2 (T-C.30)**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2025**  
**Kabupaten Kutai Kartanegara**

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	-	-	7,00%	10,00%	13,00%	16,00%	19,00%	8,87%	50,63%	13,00%	13,00%	Naiknya pesersentase Aset/Omset Koperasi
2	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	-	-	11,89%	12,24%	12,59%	12,94%	13,28%	12,01%	73,82%	12,59%	12,59%	Naiknya Persentase Usaha Mikro yang Berwirausaha
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	68	70	73	77	80	85,4		73	77	
4	Persentase Koperasi Aktif	-	-	82,53%	82,59%	82,62%	82,64%	82,67%	82,49%	83,05%	82,62%	82,64%	Pembinaan Kepada Koperasi dalam menjaga Konsistensi Koperasi Aktif
5	Persentase Kepatuhan Koperasi Melaksanakan RAT	-	-	15,56%	19,46%	21,40%	23,35%	27,23%	18,96%	20,98%	21,40%	23,35%	Pendampingan Koperasi agar Melaksanakan RAT
6	Persentase Koperasi KSP/USP berkatagori Sehat dan Cukup Sehat	-	-	3,70%	7,41%	11,11%	14,81%	18,52%	18,52%	29,19%	11,11%	14,81%	Penilaian Koperasi KSP/USP berkatagori Sehat dan Cukup Sehat

7	Persentase Pengurus dan Pengawas yang memiliki sertifikat pelatihan Perkoperasian	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
8	Persentase Koperasi yang memiliki ijin usaha simpan pinjam	-	-	45,93%	53,33%	60,74%	68,10%	75,60%	66,67%	0,00%	60,74%	60,74%	Pendampingan Koperasi untuk legalitas ijin simpan pinjam
9	Persentase meningkatnya Aset Koperasi	-	-	0,97%	1,95%	2,92%	3,89%	4,86%	2,14%	3,76%	2,92%	3,89%	Pendampingan dan pemberdayaan Koperasi dan Menjalankan usahanya
10	Persentase meningkatnya Omset Koperasi	-	-	0,97%	1,95%	2,92%	3,89%	4,86%	2,14%	4,66%	2,92%	3,89%	Pendampingan dan pemberdayaan Koperasi dan Menjalankan usahanya
11	Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru	-	-	0,35%	0,44%	0,46%	0,94%	1,01%	42,23%	0,44%	0,94%	0,94%	
12	Persentase UMKM yang telah difasilitasi	-	-	1,81%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	3,01%	2,38%	1,99%	1,99%	Fasilitasi UMKM dengan memberikan Akses Permodalan, Pelatihan, Pasar, promosi dan Bantuan
13	Pertumbuhan Omset UMKM	-	-	0,28%	0,57%	0,85%	1,10%	1,40%	0,70%	1,35%	0,85%	0,85%	Fasilitasi UMKM dengan memberikan Akses Permodalan, Pelatihan, Pasar, promosi dan Bantuan

### **2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Dengan melihat kondisi dari tingkat capaian pelayanan sebagaimana di atas, terdapat beberapa isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu :

- a. Masih rendahnya likuiditas KSP/USP.
- b. Masih rendahnya pemahaman pengelola KSP/USP – Koperasi dalam mengelola kegiatan koperasi.
- c. Masih rendahnya manajemen dan daya saing produk UMKM.
- d. Kurangnya pertumbuhan dan wirausaha baru terutama UMKM.
- e. Masih adanya koperasi yang tidak aktif (beku).
- f. Rendahnya ketrampilan manajemen pengurus koperasi.
- g. Rendahnya ketrampilan pengawas dalam bidang pengawasan.
- h. Rendahnya manajemen usaha, seringkali ada yang belum melakukan pemisahan antara bisnis/usaha dan rumah tangga.
- i. Belum memiliki legitimasi tempat usaha, belum memiliki legitimasi hukum atas asset, sehingga terjadi kesulitan dalam mengakses kredit perbankan.
- j. Rendahnya kualitas SDM Pembina, sehingga pola kemitraan sulit diterapkan baik di bidang produksi, pemasaran maupun teknologi.
- k. Rendahnya pemahaman kelompok masyarakat dalam membentuk lembaga Keuangan Mikro (LKM).
- l. Kurang berfungsinya Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kukar.
- m. Belum ada wadah/forum untuk menaungi urusan UMKM yang menjadi binaan tiap-tiap OPD

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Paparan dalam membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dituangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 (T.C 31)

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>77</b>	<b>13.831.703.059</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>77</b>	<b>13.831.703.059</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>10 Dokumen</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>10 Dokumen</b>	<b>1.000.000.000</b>	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskop-UKM	3 Dokumen	450.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskop-UKM	3 Dokumen	450.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskop-UKM	3 Laporan	50.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskop-UKM	3 Dokumen	50.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskop-UKM	2 Laporan	150.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskop-UKM	2 Laporan	150.000.000	

Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Diskop-UKM	1 Dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Diskop-UKM	1 Dokumen	50.000.000	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Diskop-UKM	1 Data	250.000.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Diskop-UKM	1 Data	250.000.000	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskop-UKM	1 Berita Acara	50.000.000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskop-UKM	1 Berita Acara	50.000.000	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>9.435.997.899</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>9.435.997.899</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Diskop-UKM	1050 Orang/bulan	9.281.556.899	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskop-UKM	1050 Orang/bulan	9.281.556.899	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	25.000.000	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	104.441.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	104.441.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Diskop-UKM	1 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Diskop-UKM	1 Dokumen	25.000.000	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>105.000.000</b>	<b>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>105.000.000</b>	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Diskop-UKM	1 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Diskop-UKM	1 Dokumen	25.000.000	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	50.000.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	30.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	30.000.000	

<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>50.000.000</b>	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Diskop-UKM			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Diskop-UKM			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Diskop-UKM	30 Orang	50.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Diskop-UKM	30 Orang	50.000.000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Diskop-UKM			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Diskop-UKM			
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>100%</b>	<b>607.512.000</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>100%</b>	<b>607.512.000</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Paket	10.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Paket	10.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Paket	72.398.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Paket	72.398.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	2 Paket	50.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	2 Paket	50.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Diskop-UKM	2 Paket	50.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Diskop-UKM	2 Paket	50.000.000	

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Dokumen	25.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Dokumen	25.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	250.064.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	250.064.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Diskop-UKM	1 Dokumen	75.050.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Diskop-UKM	1 Dokumen	75.050.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Diskop-UKM	1 Dokumen	75.000.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Diskop-UKM	1 Dokumen	75.000.000	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>100%</b>	<b>469.655.000</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>100%</b>	<b>469.655.000</b>	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Diskop-UKM	45 unit	469.655.000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Diskop-UKM	45 unit	469.655.000	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>100%</b>	<b>1.152.838.160</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>100%</b>	<b>1.152.838.160</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskop-UKM			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskop-UKM			

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Diskop-UKM	3 Laporan	393.399.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Laporan	393.399.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Laporan	759.439.160	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Laporan	759.439.160	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>100%</b>	<b>1.010.700.000</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>100%</b>	<b>1.010.700.000</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Diskop-UKM	22 unit	180.700.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Diskop-UKM	22 unit	180.700.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Diskop-UKM	30 unit	30.000.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Diskop-UKM	30 unit	30.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Diskop-UKM	4 Unit	800.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Diskop-UKM	4 Unit	800.000.000	
<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Kepatuhan Koperasi yang melaksanakan RAT</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>23,35%</b>	<b>690.000.000</b>	<b>Persentase Kepatuhan Koperasi yang melaksanakan RAT</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>23,35%</b>	<b>690.000.000</b>	

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pesentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Kab. Kutai Kartanegara	75,88%	690.000.000	Pesentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Kab. Kutai Kartanegara	75,88%	690.000.000	
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kab. Kutai Kartanegara, Luar Daerah	210 Unit Usaha	415.000.000	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kab. Kutai Kartanegara, Luar Daerah	210 Unit Usaha	415.000.000	Fasilitasi Pendampingan Koperasi ASN
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kab. Kutai Kartanegara, Luar Daerah	300 Unit Usaha	275.000.000	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kab. Kutai Kartanegara, Luar Daerah	300 Unit Usaha	275.000.000	
<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi KSP/USP Berkatagori Sehat dan Cukup Sehat</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>14,81%</b>	<b>1.125.000.000</b>	<b>Persentase Koperasi KSP/USP Berkatagori Sehat dan Cukup Sehat</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>14,81%</b>	<b>1.125.000.000</b>	
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP	Kab. Kutai Kartanegara	170 Unit Usaha	1.125.000.000	Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP	Kab. Kutai Kartanegara	170 Unit Usaha	1.125.000.000	
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara, Luar Daerah	85Unit Usaha	125.000.000	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara, Luar Daerah	85Unit Usaha	125.000.000	

Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara, Luar Daerah	85 Unit Usaha	1.000.000.000	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara, Luar Daerah	85 Unit Usaha	1.000.000.000	Penghargaan/Pemeringkatan Koperasi dan Peringatan Hari Koperasi Nasional
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Persentase Pengrus dan Pengawas yang memiliki sertifikat petihan perkoperasian</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000.000</b>	<b>Persentase Pengrus dan Pengawas yang memiliki sertifikat petihan perkoperasian</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000.000</b>	
<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah koperasi yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>90 Koperasi</b>	<b>300.000.000</b>	<b>Jumlah koperasi yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>90 Koperasi</b>	<b>300.000.000</b>	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	1. Muara Kaman, Sabintulung 2. Sebulu, Sebulu Ilir 3. Kenohan, Teluk Bingkai 4. Kembang Janggut, Muai 5. Tenggarong	180 orang	300.000.000	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	1. Muara Kaman, Sabintulung 2. Sebulu, Sebulu Ilir 3. Kenohan, Teluk Bingkai 4. Kembang Janggut, Muai 5. Tenggarong	180 orang	300.000.000	
<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>Persentase Koperasi yang memiliki ijin usaha simpan pinjam</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>			<b>Persentase Koperasi yang memiliki ijin usaha simpan pinjam</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>			
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Simpan Koperasi	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>			Cakupan Penerbitan Izin Usaha Simpan Koperasi	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>			

Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara			
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Persentase meningkatnya Aset Koperasi</b>	Kab. Kutai Kartanegara	<b>3,89%</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>Persentase meningkatnya Aset Koperasi</b>	Kab. Kutai Kartanegara	<b>3,89%</b>	<b>1.300.000.000</b>	
	<b>Persentase meningkatnya Omzet Koperasi</b>		<b>3,89%</b>		<b>Persentase meningkatnya Omzet Koperasi</b>		<b>3,89%</b>		
<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>55 Koperasi</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>150 Unit Usaha</b>	<b>1.300.000.000</b>	
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Loa Kulu , Tenggarong , Sebulu , Muara Kaman , Tenggarong Seberang , Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara Luar Daerah	150 Unit Usaha	1.300.000.000	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Loa Kulu , Tenggarong , Sebulu , Muara Kaman , Tenggarong Seberang , Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara Luar Daerah	150 Unit Usaha	1.300.000.000	Penguatan Pengetahuan SDM dan Kelembagaan Bagi Koperasi Sektor Pertanian Dalam Arti Luas (Dedikasi Bupati)

<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Persentase UMKM yang telah difasilitasi</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>1,99%</b>	<b>3.550.000.000</b>	<b>Persentase UMKM yang telah difasilitasi</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>1,99%</b>	<b>3.550.000.000</b>	
<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>Jumlah UMKM yang di Berdayakan</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>16.968 UMKM</b>	<b>3.550.000.000</b>	<b>Jumlah UMKM yang di Berdayakan</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>16.968 UMKM</b>	<b>3.550.000.000</b>	
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Kab. Kutai Kartanegara	15.000 Unit Usaha	1.055.000.000	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Kab. Kutai Kartanegara	15.000 Unit Usaha	1.055.000.000	
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	120 Unit Usaha	200.000.000	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	120 Unit Usaha	200.000.000	
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	1. Muara Kaman, Puan Cepak 2. Samboja, Argosari 3. Muara Muntai 4. Kota Bangun 5. Muara Jawa 7. Loa Janan 8. Muara Badak 9. Tenggarong 10. Kenohan 11, Tenggarong Seberang	1.160 Unit Usaha	720.000.000	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	1. Muara Kaman, Puan Cepak 2. Samboja, Argosari 3. Muara Muntai 4. Kota Bangun 5. Muara Jawa 7. Loa Janan 8. Muara Badak 9. Tenggarong 10. Kenohan 11, Tenggarong Seberang	1.160 Unit Usaha	720.000.000	Faslitasi Halal Program Usaha Kecil Idaman, Stunting

Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1. Kelurahan Dondang, Muara Jawa 2. kelurahan tama, pole muara jawa 3. Prangat Baru, Marang Kayu 4. Jantur Baru, Muara Muntai 5. Kayu Batu, Muara Muntai 6. Sanga-Sanga Dalam, Sanga-Sanga 7. Sari Jaya, Sanga-Sanga 8. Kab. Kutai Kartanegara 9. Luar Daerah	588 Unit Usaha	1.425.000.000	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1. Kelurahan Dondang, Muara Jawa 2. kelurahan tama, pole muara jawa 3. Prangat Baru, Marang Kayu 4. Jantur Baru, Muara Muntai 5. Kayu Batu, Muara Muntai 6. Sanga-Sanga Dalam, Sanga-Sanga 7. Sari Jaya, Sanga-Sanga 8. Kab. Kutai Kartanegara 9. Luar Daerah	588 Unit Usaha	1.425.000.000	Program Usaha Kecil Idaman, Program Dedikasi (Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN), Stunting
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Muara Badak , Tenggarong , Kota Bangun , Muara Kaman , Samboja , Tenggarong Seberang, Muara Muntai , Loa Janan , Sebulu , Marang Kayu	100 Orang	150.000.000	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Muara Badak , Tenggarong , Kota Bangun , Muara Kaman , Samboja , Tenggarong Seberang, Muara Muntai , Loa Janan , Sebulu , Marang Kayu	100 Orang	150.000.000	Program Usaha Kecil Idaman, Pembentukan dan pemberdayaan Klinik K-UKM di Kecamatan
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Pertumbuhan Omzet UMKM</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>1,10%</b>	<b>2.850.000.000</b>	<b>Pertumbuhan Omzet UMKM</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>1,10%</b>	<b>2.850.000.000</b>	

Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	380 Unit Usaha	2.850.000.000	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	320 Unit Usaha	2.850.000.000	
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Loa Janan , Anggana , Kenohan , Tenggarong Seberang , Muara Wis, Muara Badak , Tenggarong , Sanga- Sanga, Prov. Kalimantan Timur , KAB. KUTAI KARTANEGARA , Luar Daerah	380 Unit Usaha	2.850.000.000	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Loa Janan , Anggana , Kenohan , Tenggarong Seberang , Muara Wis, Muara Badak , Tenggarong , Sanga- Sanga, Prov. Kalimantan Timur , KAB. KUTAI KARTANEGARA , Luar Daerah	380 Unit Usaha	2.850.000.000	Program Usaha Kecil Idaman
JUMLAH				23.646.703.059				23.646.703.059	

Hasil analisa kebutuhan merupakan usulan Program/kegiatan berdasarkan pagu yang diberikan pada saat Forum Perangkat Daerah, sehingga terdapat perbedaan rincian dengan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, perbedaan tersebut pada besaran anggaran tiap kegiatan, juga terdapat perbedaan pada rincian Output serta jumlah target kegiatan;

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun ini Pembahasan dilakukan terlebih dahulu pengentrian usulan pada SIPD-RI sebagai bahan Pembahasan yang kemudian Rancangan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM didiskusikan dalam pembahasan Forum OPD Kabupaten Kutai Kartanegara dan pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan Kesepakatan hasil Musrenbang.

Pada Pembahasan di Forum OPD ada beberapa Program/Kegiatan/Subkegiatan yang ditujukan kepada Dinas Koperasi dan UKM, usulan dari pemangku kepentingan tersaji dalam Tabe berikut ini.

Tabel 2.4 (TC 3.2)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025  
Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>				
	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Sabintulung	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30 Orang	Murenbang Kecamatan
2	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Teluk Bingkai		30 Orang	Murenbang Kecamatan
3	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Sebulu Ilir		30 Orang	Murenbang Kecamatan

4	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Muai		30 Orang	Murenbang Kecamatan
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>				
	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>				
1	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Puan Cepak	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan
2	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Argo Sari		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan
3	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dondang	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan
4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tama Pole		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan
5	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Prangat Baru		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan
6	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jantur Baru		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan
7	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kayu Batu		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan
8	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Sanga-Sanga Dalam		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan
9	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Sari Jaya		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**DINAS KOPERASI DAN UKM**

**3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah membawa perubahan sistem Pemerintahan Indonesia yang sentralistik ke arah desentralistik.

Dan bila dikaitkan dengan Urusan di Bidang Koperasi dan UKM maka Pemberdayaan Koperasi dan UKM, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (pro poor). Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (pro growth). Keberadaan Koperasi dan UKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka pertuasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran

Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan Koperasi dan UKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UKM merupakan leader perekonomian Indonesia. Ia menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan

Beberapa kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Propinsi berkaitan dengan pengembangan Koperasi dan UKM :

Kebijakan Nasional Urusan Koperasi dan UKM yang utama sebagai berikut :

1. Mewujudkan Koperasi Modern yang berdaulat, mandiri, dan maju dengan Fokus Kontribusi PDB sector Koperasi, Mewujudkan Koperasi Model Baru dan Modern, Pertumbuhan Stat-Up berbasis Koperasi;
2. Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang berdaulat mampu bersaing di Pasar Domestik dan Global dengan Focus, Kontribusi PDB di sector UMKM, Nilai Ekspor UMKM, Nilai Investasi UMKM, UKM Naik Kelas, Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM, Rasio Kewirausahaan;

Kebijakan Propinsi Urusan Koperasi dan UKM yang utama sebagai berikut :  
Meningkatkan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM, melalui Sumbangan Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB dengan focus menciptakan Koperasi Unggulan, dan UKM Unggulan

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD**

#### **3.2.1 Tujuan**

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih dengan Fokus Pembangunan Tahun 2025 dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dapat diuraikan Tujuan dan sasarannya sebagai berikut :

1. Tujuan Pertama, Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Tujuan Kedua, Meningkatnya Produktifitas melalui Pemberdayaan dan Penguatan Kualitas Koperasi dan UMKM dengan Fokus Memberdayakan dan menguatkan usaha mikro dan koperasi terutama dari Kelembagaan, akses permodalan, manajemen usaha, teknologi Produksi, Informasi, dan pemasaran;

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang ditetapkan yaitu 5 (lima) tahun.

Pencapaian tujuan dan sasaran merupakan sebuah rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakn secara operasional dengan memperhatikan, ketersediaan sumber daya organisasi.

#### **3.2.2 Sasaran**

Berdasarkan tujuan tersebut maka Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sasaran yang akan dicapai sebagai berikut

1. Sasaran Pertama, *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Diskop UKM;*

2. Sasaran Kedua, *Mempertahankan Jumlah Koperasi Aktif, dengan indikator Persentase Koperasi Aktif;*
3. Sasaran Ketiga, *Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha, dengan Indikator Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha;*
4. Sasaran Keempat, *Pengembangan Usaha bagi masyarakat miskin berdasarkan Basis Data Terpadu Kemiskinan dan berbasis teknologi informasi, Indikatornya Jumlah Fasilitas Pengembangan Usaha bagi masyarakat miskin berdasarkan Basis Data Terpadu Kemiskinan dan berbasis teknologi informasi*

Tabel 3. 1

## Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Satuan	Kondisi Awal	INDIKATOR				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi dan UMKM	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Diskop UKM	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Persentase	67.76	71,94%	70%	73%	77%	80%
2	Meningkatnya Produktifitas melalui Pemberdayaan dan Penguatan Kualitas Koperasi dan UMKM	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang meningkat Kualitasnya	Persentase	4%	7%	10%	13%	16%	19%
			Persentase Koperasi yang Aktif	Persentase	82%	82%	82%	82%	82%	82%
			Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persentase	12%	12,57%	12,75%	12,93%	13,11%	13,28%

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Fokus / Tema Pembangunan Kutai Kartanegara “Memperkuat Landasan Bagi Percepatan (Akselerasi) dan Pembaharuan (Transformasi) Pembangunan Berbasis Potensi Kewilayahan dan Komoditi Unggulan Daerah;
2. Mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dalam Visi Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia, dengan Misi Kepala Daerah terpilih :



Dalam Rencana Kerja Tahun 2025 ini Dinas Koperasi memperhatikan berbagai Regulasi dan memastikan Sinkronisasi Substansi dan Proses dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana amanat dari Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 05.05.889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah mempunyai amat bertanggung jawab dalam menyusun program, yang berpedoman pada kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan, keuangan daerah;

Dalam mencapai target perangkat daerah yang termuat pada Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mengah Kabupaten Kutai Kartanegara akan menjalankan tugas dan Fungsi sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Perumusan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mengah Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Rincian dan Jumlah Program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
7. Program Pengembangan UMKM

Tabel 4.1

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS  
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH TAHUN 2025 DAN TAHUN MAJU 2026**

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>2.17.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Nilai Sakip Perangkat Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>77</b>	<b>13.831.703.059</b>			<b>80.00</b>	<b>11.811.090.432</b>
<b>2.17.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Rencanam Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>Apbd</b>		<b>4 Dokumen</b>	<b>290.000.000</b>
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskop-UKM	3 Dokumen	450.000.000	Apbd		2 Dokumen	100.000.000
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskop-UKM	3 Dokumen	50.000.000	Apbd		3 Dokumen	190.000.000
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskop-UKM	2 Laporan	150.000.000	Apbd			
2.17.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Diskop-UKM	1 Dokumen	50.000.000	Apbd			
2.17.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Diskop-UKM	1 Data	250.000.000	Apbd			

2.17.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskop-UKM	1 Berita Acara	50.000.000	Apbd			
<b>2.17.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>9.435.997.899</b>	<b>Apbd</b>			<b>9.087.187.060</b>
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Diskop-UKM	1050 Orang/bulan	9.281.556.899	Apbd		75 Orang/bulan	8.982.743.077
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	25.000.000	Apbd			
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	104.441.000	Apbd		1 Laporan	104.443.983
2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Diskop-UKM	1 Dokumen	25.000.000	Apbd			
2.17.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>105.000.000</b>	<b>Apbd</b>		<b>1 Laporan</b>	<b>93.926.000</b>
2.17.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Diskop-UKM	1 Dokumen	25.000.000	Apbd		1 Laporan	93.926.000

2.17.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	50.000.000	Apbd			
2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	30.000.000	Apbd			
<b>2.17.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Apbd</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>125.000.000</b>
2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Diskop-UKM			Apbd		106 Stel	75.000.000
2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Diskop-UKM	30 Orang	50.000.000	Apbd		30 Orang	50.000.000
2.17.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>100%</b>	<b>607.512.000</b>	<b>Apbd</b>		<b>100%</b>	<b>555.114.000</b>
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Paket	10.000.000	Apbd		1 Paket	10.000.000
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Paket	72.398.000	Apbd		1 Paket	70.000.000
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	2 Paket	50.000.000	Apbd		1 Paket	50.000.000
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Diskop-UKM	2 Paket	50.000.000	Apbd		1 Paket	50.000.000

2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Dokumen	25.000.000	Apbd		1 Dokumen	25.000.000
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	250.064.000	Apbd		1 Laporan	250.064.000
2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Diskop-UKM	1 Dokumen	75.050.000	Apbd		1 Dokumen	75.050.000
2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Diskop-UKM	1 Dokumen	75.000.000	Apbd		1 Dokumen	25.000.000
2.17.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>100%</b>	<b>469.655.000</b>	Apbd		<b>100%</b>	<b>249.294.920</b>
2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Diskop-UKM	45 unit	469.655.000	Apbd		30 unit	249.294.920
2.17.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>100%</b>	<b>1.152.838.160</b>	Apbd		<b>100%</b>	<b>914.696.592</b>
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1 Laporan	2.398.000
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Laporan	393.399.000	Apbd		1 Laporan	152.859.432

2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Laporan	759.439.160	Apbd		1 Laporan	759.439.160
<b>2.17.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>100%</b>	<b>1.010.700.000</b>	<b>Apbd</b>		<b>100%</b>	<b>495.871.860</b>
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Diskop-UKM	22 unit	180.700.000	Apbd		25 unit	180.700.000
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Diskop-UKM	30 unit	30.000.000	Apbd		20 unit	30.000.000
2.17.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Diskop-UKM	4 Unit	800.000.000	Apbd		3 Unit	285.171.860
<b>2.17.03</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Kepatuhan Koperasi yang melaksanakan RAT</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>23,35%</b>	<b>690.000.000</b>	<b>Apbd</b>		<b>27,24%</b>	<b>550.000.000</b>
<b>2.17.03.02.01</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Pesentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>75,88%</b>	<b>690.000.000</b>	<b>Apbd</b>		<b>83,87%</b>	<b>550.000.000</b>

2.17.03.02.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kab. Kutai Kartanegara, Luar Daerah	210 Unit Usaha	415.000.000	Apbd	Fasilitasi Pembentukan/Pendampingan Koperasi ASN	230 Unit Usaha	225.000.000
2.17.03.02.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kab. Kutai Kartanegara, Luar Daerah	300 Unit Usaha	275.000.000	Apbd		330 Unit Usaha	325.000.000
<b>2.17.04</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi KSP/USP Berkatagori Sehat dan Cukup Sehat</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>14,81%</b>	<b>1.125.000.000</b>	<b>Apbd</b>		<b>18,82%</b>	<b>220.000.000</b>
<b>2.17.04.2.01</b>	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>170 Unit Usaha</b>	<b>1.125.000.000</b>	<b>Apbd</b>		<b>180 Unit Usaha</b>	<b>220.000.000</b>
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara, Luar Daerah	85Unit Usaha	125.000.000	Apbd		90 Unit Usaha	130.000.000
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara, Luar Daerah	85 Unit Usaha	1.000.000.000	Apbd		90 Unit Usaha	90.000.000
<b>2.17.05</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Persentase Pengrus dan Pengawas yang memiliki sertifikat petihan perkoperasian</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000.000</b>			<b>100,00%</b>	<b>300.000.000</b>
<b>2.17.05.2.01</b>	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah koperasi yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>90 Koperasi</b>	<b>300.000.000</b>	<b>Apbd</b>		<b>90 Koperasi</b>	<b>300.000.000</b>

2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	1. Muara Kaman, Sabintulung 2. Sebulu, Sebulu Ilir 3. Kenohan, Teluk Bingkai 4. Kembang Janggut, Muai 5. Tenggarong	180 orang	300.000.000	Apbd		180 orang	300.000.000
2.17.02	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>Persentase Koperasi yang memiliki ijin usaha simpan pinjam</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>Apbd</b>		<b>75,6%</b>	<b>100.000.000</b>
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Simpan Koperasi	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>0%</b>	-	<b>Apbd</b>		<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	0 Unit Usaha	-	Apbd	Program Ini Ditiadakan Karena Adanya Regulasi Terkait Dengan Perizinan Simpan Pinjam Sebagaimana Surat Edaran No. 11 Tahun 2022 Tentang Moratorium Perizinan Simpan Pinjam Koperasi Tanggal 17 November 2022	10 Unit Usaha	100.000.000
2.17.06	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Persentase meningkatnya Aset Koperasi</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>3,89%</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>Apbd</b>		<b>4,86%</b>	<b>800.000.000</b>
		<b>Persentase meningkatnya Omzet Koperasi</b>		<b>3,89%</b>				<b>4,86%</b>	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>55 Unit Usaha</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>Apbd</b>		<b>60 Unit Usaha</b>	<b>800.000.000</b>

2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Loa Kulu , Tenggarong , Sebulu , Muara Kaman , Tenggarong Seberang , Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara Luar Daerah	150 Unit Usaha	1.300.000.000	Apbd	Dedikasi Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan	60 Unit Usaha	800.000.000
<b>2.17.07</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Persentase UMKM yang telah difasilitasi</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>1,99%</b>	<b>3.550.000.000</b>			<b>1,99%</b>	<b>2.280.000.000</b>
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang di Bdayakan	Kab. Kutai Kartanegara	16.968 UMKM	3.550.000.000	Apbd		1.121 UMKM	2.280.000.000
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Kab. Kutai Kartanegara	15.000 Unit Usaha	1.055.000.000	Apbd		0	-
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	120 Unit Usaha	200.000.000	Apbd		20 Unit Usaha	50.000.000
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Muara Kaman, Puan Cepak. Samboja, Argosari. Muara Muntai . Kota Bangun .Muara Jawa. Loa Janan. Muara Badak. Tenggarong. Kenohan. Tenggarong Seberang	1.160 Unit Usaha	720.000.000	Apbd	Dedikasi Usaha Kecil Idaman	140 Unit Usaha	500.000.000

2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1. Kelurahan Dondang, Muara Jawa 2. Kelurahan tama, pole muara jawa 3. Prangat Baru, Marang Kayu 4. Jantur Baru, Muara Muntai 5. Kayu Batu, Muara Muntai 6. Sanga-Sanga Dalam, Sanga-Sanga 7. Sari Jaya, Sanga-Sanga 8. Kab. Kutai Kartanegara 9. Luar Daerah	588 Unit Usaha	1.425.000.000	Apbd	Dedikasi Usaha Kecil Idaman	720 Unit Usaha	1.105.000.000
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Muara Badak , Tenggarong , Kota Bangun , Muara Kaman , Samboja , Tenggarong Seberang, Muara Muntai , Loa Janan , Sebulu , Marang Kayu	100 Orang	150.000.000	Apbd	Pembentukan dan pemberdayaan Kinik K-UKM di Kecamatan	120 Orang	625.000.000
<b>2.17.08</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Pertumbuhan Omzet UMKM</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>1,10%</b>	<b>2.850.000.000</b>			<b>1,40%</b>	<b>2.190.000.000</b>
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	320 Unit Usaha	2.850.000.000			320 Unit Usaha	2.190.000.000

2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Loa Janan , Anggana , Kenohan , Tenggarong Seberang , Muara Wis, Muara Badak , Tenggarong , Sanga- Sanga, Prov. Kalimantan Timur , KAB. KUTAI KARTANEGARA , Luar Daerah	380 Unit Usaha	2.850.000.000	Apbd		320 Unit Usaha	2.190.000.000
	JUMLAH				<b>23.646.703.059</b>				<b>18.251.090.432</b>

## **BAB V PENUTUP**

### **1. Catatan Penting**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun berdasarkan Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Strategis Perencanaan Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan perencanaan program dan kegiatan satu tahun kedepan dibuat secara efektif dan partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjamin keberhasilan program/kegiatan Renja PD (program tahunan) yang merupakan implementasi dari Renstra Perangkat Daerah (program 5 tahunan), maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan Rencana Kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh aparatur.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara selain menjadi program/kegiatan selama tahun 2025 juga berfungsi sebagai peningkatan kinerja aparatur serta barometer untuk menjadi umpan balik untuk perencanaan pada tahun berikutnya.

### **2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Rencana program di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan program pemberdayaan masyarakat serta kegiatan kerja aparatur pada periode Tahun 2025. Dalam pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara yang pelaksanaannya bersifat efisien, tepat sasaran dan berdaya

guna serta pelaksanaan mendukung Indikator Kinerja Utama sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.

### 3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara selain menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara. RENJA PD juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara. RENJA juga berperan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Demikian gambaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahunan tahun 2025, dengan berdasarkan azas perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan, pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi untuk melaksanakan kegiatan yang akan datang guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara yang Optimal.

Tenggarong, Agustus 2024

Plt.Kepala Dinas

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Kabupaten Kutai Kartanegara



**H. Thaufiq Zulfian Noor, S.Pi., M.A.P**  
**NIP.197401222001121002**

**LAMPIRAN**  
**CAPAIAN PROGRAM DEDIKASI**  
**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan  
(Pembangunan Koperasi yang Sehat dan Produktif Berbasis Kawasan)**

Koperasi Yang tersebar di 5 Kawasan Pertanian Sektor Pertanian,Perkebunan:

NO.	KECAMATAN	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota	Ketaatan/Aktif RAT	
				Aktif	Tidak
1	MUARA KAMAN	4	139	-	4
2	SEBULU	9	759	2	7
3	TENGGARONG	2	63	-	2
4	TENGGARONG SEBERANG	5	1,001	4	1
5	LOA KULU	7	710	5	2
6	MARANGKAYU	4	22	1	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>31</b>	<b>2,694</b>	<b>12</b>	<b>19</b>

Daftar Koperasi Yang tersebar di 5 Kawasan Pertanian Sektor Pertanian,Perkebunan :

NO	NAMA KOPERASI	KECAMATAN	ALAMAT/DESA
1	Tani Makmur Andalan	Muara Kaman	Sido Mukti
2	Mitra Sejahtera Abadi	Muara Kaman	Bunga Jadi
3	Karya Bangsa Mandiri	Muara Kaman	Desa Bunga Jadi
4	Sukses Sejahtera	Muara Kaman	Puan Cepak
5	Wiyata Mandala	Sebulu	Manunggal Jaya
6	Sawit Lestari Harapan Bersama	Sebulu	Sumber Sari
7	Serba Usaha Etam Sejahtera Bersama	Sebulu	Sumber Sari
8	Sama Maju Jaya	Sebulu	Segihan
9	Segihan Mitra Lestari	Sebulu	Segihan
10	Karya Etam	Sebulu	Segihan
11	Pemuda Mandiri Sejahtera	Sebulu	Tanjung Harapan
12	GUNUNG DED'EH SEJAHTERA	Sebulu	Sebulu Ilir
13	HIDUP BERSAMA	Sebulu	Serbaya
14	Karya Makmur Mandiri	Tenggarong	Bukit Biru
15	Lkm-A Gapoktan Sukodadi	Tenggarong	Mangkurawang
16	Tri Sandya Yudha	Loa Kulu	Jembayan
17	Setia Budi	Loa Kulu	Rempanga
18	Lkm-A Gapoktan Mulya Abadi	Loa Kulu	Sumber Sari
19	Mina Loa Kulu Sejahtera	Loa Kulu	Ponoragan
20	Tunas Harapan	Loa Kulu	Sungai Payang
21	Syariah Sejahtera	Loa Kulu	Jonggon
22	Sejahtera Maju Bersama	Loa Kulu	Lung Anai
23	Perikanan Cattoni Jaya Damai Sejahtera	Marang Kayu	Desa Santan Ilir
24	Sawit Tani Jaya	Marang Kayu	Desa Gunung Menangis
25	Dana Karya Mandiri	Marang Kayu	Perangat Selatan
26	Cahaya Sinar Pagi	Marang Kayu	Santan Ilir
27	Semoga Jaya	Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya
28	Galang Rejeki	Tenggarong Seberang	Bangun Rejo
29	Rukun Makmur Sejahtera	Tenggarong Seberang	Bangun Rejo
30	Bina Tani Jaya Bersama	Tenggarong Seberang	Bukit Pariaman
31	Setia Abadi	Tenggarong Seberang	Suka Maju (Dp)

**Metode Pelaksanaan** dalam Memfasilitasi Koperasi yang bergerak di Sektor Pertanian dalam arti luas melalui Penguatan Kelembagaan Koperasi Sektor Usaha Pertanian ;

- a. Melakukan Identifikasi Rapat penyusunan Kertas Kerja Identifikasi yang paling utama berisi Aset Koperasi, Omset Koperasi, Usaha Utama Yang dijalankan, Dan apa ada Usaha-usaha lainnya dilakukan Koperasi, Apa permasalahannya dan apa yang diharapkannya dari Pembina;

- b. Penyusunan Jadwal dan Identifikasi Awal Sasaran Koperasi yang akan menjadi target dalam pengisian Kertas Kerja Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- c. Mengumpulkan hasil Identifikasi dan membuat Analisis dan rencana Tindak lanjut / Intervensi yang akan diberikan dalam Penguatan dan Penyiapan Kelembagaan Koperasi di Sektor Pertanian dalam arti luas;
- d. Tindak lanjut / Intervensi yang bisa dilakukan oleh Pembina dalam mengatasi permasalahan Koperasi di Sektor Pertanian dalam arti luas (dari Aspek Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Kelembagaan, Manajemen, Pelaporan Ketaatan Koperasi, Tingkat SDM Koperasi dst);
- e. Intervensi lanjutan bila diperlukan membuat Kelas Pemberian Bimbingan Teknis dalam Penyusunan Laporan Neraca Keuangan, Pembuatan NIB, Pelaporan Pajak dan Akses Pasar/Penguasaan IT/Digitalisasi Koperasi;

**Faktor Penghambat dan Pendorong:**

1. Apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan program? Minimnya Kader Muda dalam mengelola Koperasi dan masih kalangan tua, sementara tantangan Teknologi dan Informasi di era globalisasi dan masih kurangnya SDM Pembina Koperasi;
2. Apa saja faktor yang mendorong keberhasilan program Kepemimpinan yang kuat, partisipasi aktif anggota, manajemen yang efisien, dukungan eksternal, akses ke sumber daya, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan adalah kunci untuk memastikan koperasi dapat berkembang dan berfungsi secara efektif. Evaluasi berkala dan perbaikan berkelanjutan juga penting untuk menghadapi tantangan dan memaksimalkan hasil dari program;

**Rekomendasi (Rencana Tindak):**

Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program, memperluas manfaatnya, dan mengatasi tantangan yang mungkin dihadapi:

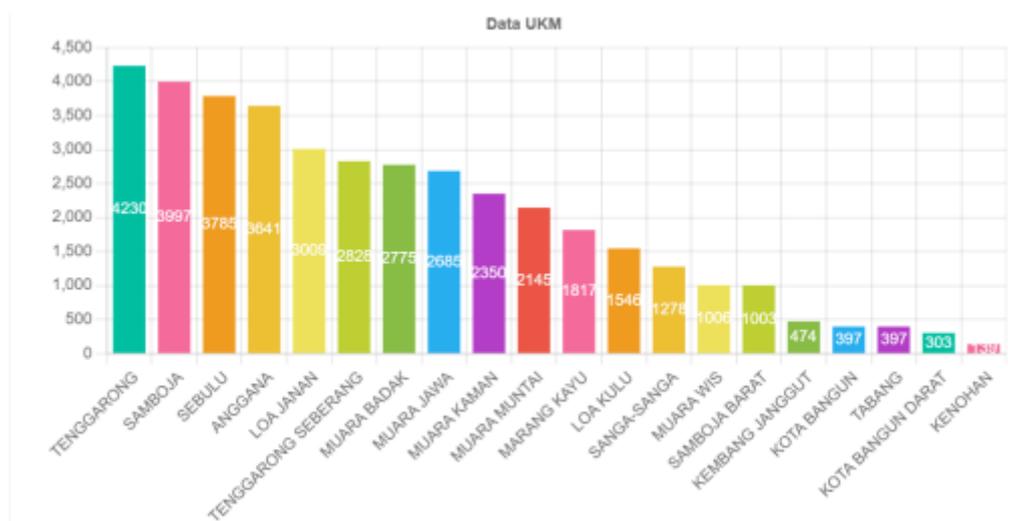
- Pelatihan Manajemen Koperasi, Sediakan pelatihan manajerial lanjutan untuk pengurus koperasi, termasuk dalam bidang keuangan, perencanaan strategis, dan kepemimpinan (Kader Milenial) dan penambahan dan peningkatan SDM Pembina Koperasi;
- Program Peningkatan Keterampilan: pelatihan untuk anggota koperasi dalam teknik pertanian modern, teknologi baru, dan manajemen usaha untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi bersama Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian;
- Penguatan Pemanfaatan Platform Digital untuk memasarkan produk secara online, meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas, dan mempermudah transaksi
- Riset dan Pengembangan, untuk mencari solusi inovatif bagi tantangan Koperasi dan meningkatkan metode /model usaha Koperasi;

- Membangun kesadaran mengenai koperasi adalah langkah penting untuk memperkuat dan mengembangkan model bisnis ini dalam masyarakat;

### USAHA KECIL IDAMAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia termasuk di Kutai Kartanegara yang merupakan mata pencarian mayoritas masyarakat, sehingga urgensi penguatan sektor UMKM menjadi penting untuk diintervensi oleh Pemerintah. Besarnya pasar tenaga kerja Indonesia dan keinginan untuk menciptakan stabilitas ekonomi harus didukung oleh iklim usaha yang lebih baik. Kualitas iklim usaha Indonesia masih perlu diperbaiki, terutama dalam hal kemudahan usaha, kebijakan di bidang Kewirausahaan, kondisi infrastruktur untuk berwirausaha, serta karakteristik pelaku usaha.

Jumlah penduduk Kutai Kartanegara yang menjadi pelaku usaha tergolong tinggi, data statistik menunjukkan hingga Juni 2024 terdapat sejumlah 66.833 pelaku UMKM yang terdata, dan terdapat sejumlah 43.985 yang telah memiliki NIB yang tersebar di 20 Kecamatan. Namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan keinginan untuk berkembang, sehingga tingginya minat melakukan usaha tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya usaha mikro atau ultra mikro yang melakukan usaha tanpa adanya tenaga kerja (tetap dan paruh waktu) yang dibayar. Selain itu, keinginan para pelaku usaha untuk memasuki pasar global atau melakukan ekspor cenderung rendah. Untuk itu, para pelaku usaha di Kutai Kartanegara perlu dikembangkan menjadi Wirausaha.

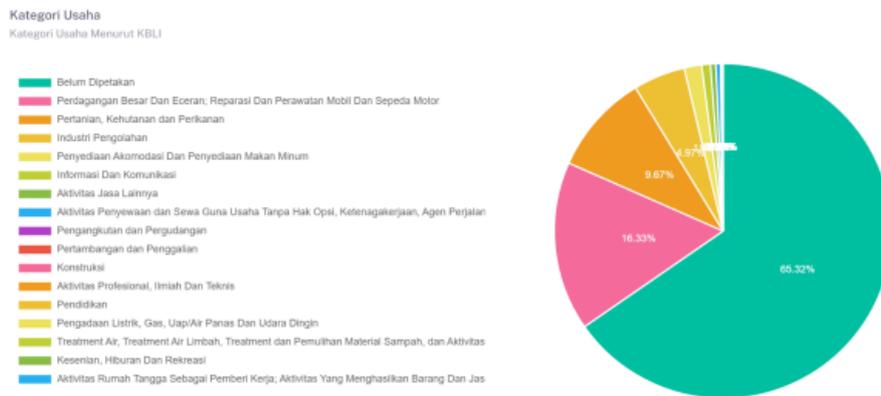


Pelaksanaan program Usaha Kecil IDAMAN dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu :

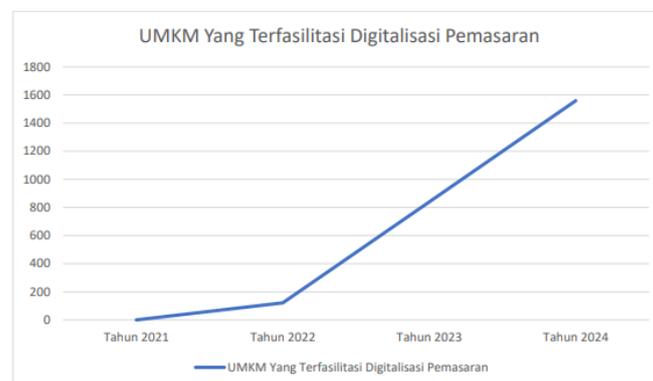
- 1) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro,
- 2) Program Pengembangan UMKM.

Program pemberdayaan UMKM dilaksanakan dengan tolak ukur indikator yaitu persentase UMKM yang difasilitasi, program ini dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan usaha (pelatihan Wirausaha Baru), pelatihan kelembagaan usaha

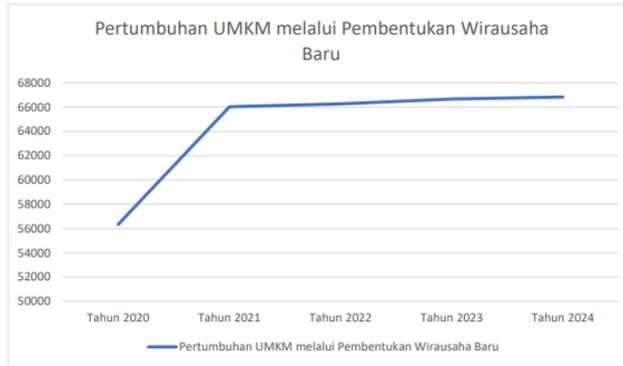
mikro, serta pengembangan usaha pada Wirausaha Baru yang dilaksanakan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mengundang masyarakat umum yang memiliki keminatan untuk berwirausaha, pelaku wirausaha baru, masyarakat yang termasuk dalam data DTKS / masyarakat miskin, masyarakat yang bergerak pada sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan mengembangkan usaha berdasarkan potensi sumber daya yang ada di wilayah masing-masing.



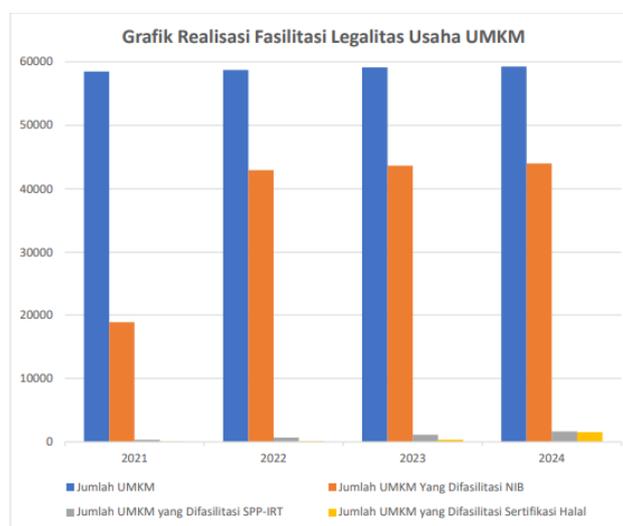
## Realisasi



Realisasi program penyediaan dan kerjasama dengan e-commerce melalui program digitalisasi dan pemasaran berbasis online telah menyentuh hingga 1.559 pelaku UMKM melalui berbagai macam platform e-commerce



Program fasilitasi pembentukan Wirausaha Baru sejak diawali tahun 2021 hingga Juni Tahun 2024 telah bertumbuh sebesar 10.490 UMKM (dari eksisting sejumlah 56.343 menjadi 66.833 di Juni 2024



Progress realisasi program fasilitasi legalitas usaha UMKM dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak DPMPTSP Kab. Kutai Kartanegara, Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara, serta Petugas Pendamping Produk Halal yang dilaksanakan on the spot di 20 Kecamatan di Kutai Kartanegara telah tercapai sampai dengan Juni 2024 di angka 74,20% dari total seluruh UMKM sebagaimana sajian grafik diatas, dan hal ini masih terus berproses dengan harapan seluruh pelaku UMKM memiliki legalitas usaha



Program Kredit Kukar Idaman sendiri telah diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 67 Tahun 2023, dimana hingga bulan Juli Tahun 2024 ini telah tersalurkan kepada 1.204 nasabah pelaku UMKM dengan total

nilai pinjaman sebesar Rp. 23.411.000.000 (Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Rupiah)

**Faktor penghambat dan Pendorong :**

Perjalanan program dedikasi Usaha Kecil IDAMAN tentu saja memiliki berbagai tantangan dan kendala dalam perjalanannya, seperti besarnya jumlah eksisting UMKM yang ada dibanding dengan target dan realisasi tahunan yang dicapai, keterbatasan dukungan anggaran untuk menyentuk bantuan ke seluruh UMKM, masih rendahnya kesadaran pelaku UMKM untuk bangkit dan mengembangkan usahanya, serta persaingan dengan produk-produk dari daerah sekitar menjadi tantangan dan kendala dalam berjalannya program ini.

Namun terdapat pula banyak faktor pendukung dari program ini, antara lain banyaknya produk potensial yang ada di Kutai Kartanegara, sumber daya alam sebagai bahan baku lokal yang dapat dimanfaatkan, perkembangan kemajuan era digital yang memudahkan akses pemasaran, hingga meningkatnya kebutuhan beli masyarakat lokal dalam negeri yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM ini masih dapat dilihat kemajuannya melalui program dedikasi Usaha Kecil IDAMAN ini

**Penutup**

Setelah adanya program dedikasi Usaha Kecil IDAMAN sejak Tahun 2021 hingga Tahun 2024 ini ekspansi produk-produk dari Kutai Kartanegara ke pasar sangat pesat, bermunculan produk-produk unggulan khas dari setiap Kecamatan yang mudah dijumpai di berbagai tenant penjualan di kota, varian dan diversifikasi produk yang berbagai macam, hingga berbagai macam produk yang telah berhasil melakukan penjualan di level lokal, regional, nasional, hingga menembus pasar ekspor

